

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung serta Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, DPPKB Kota Bandung memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan program pembangunan keluarga, termasuk pembinaan, pengawasan, serta koordinasi lintas sektor di tingkat kelurahan.

Salah satu program strategis yang menjadi tanggung jawab DPPKB Kota Bandung adalah Program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), yaitu program pembangunan berbasis wilayah yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan institusi keluarga secara terintegrasi dan lintas sektor.

Program Kampung KB pertama kali diluncurkan pada tahun 2016 sebagai Program Kampung Keluarga Berencana, kemudian berkembang menjadi Program Kampung Keluarga Berkualitas sejak tahun 2020 dengan cakupan yang lebih luas. Program ini menyasar seluruh desa dan kelurahan di Indonesia melalui pendekatan

siklus hidup mulai dari anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Kehadiran Program Kampung KB merupakan wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga yang menegaskan bahwa penguatan fungsi dan ketahanan keluarga merupakan bagian penting dalam peningkatan kualitas penduduk secara nasional.

Pada tahun 2022, pemerintah pusat memperkuat pelaksanaan Program Kampung KB melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. Di tingkat daerah, Pemerintah Kota Bandung menindaklanjuti kebijakan tersebut melalui (Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 476/Kep.627-DPPKB/2024 Tentang Penetapan Program Kampung Keluarga Berkualitas Di Kota Bandung, 2024)

Kota Bandung sebagai wilayah perkotaan memiliki tingkat heterogenitas sosial dan dinamika kependudukan yang tinggi. Kondisi tersebut memunculkan berbagai persoalan sosial, seperti meningkatnya jumlah keluarga berisiko, permasalahan remaja, serta ketimpangan ekonomi antarkeluarga. Permasalahan kependudukan tidak hanya menjadi isu nasional, tetapi juga menjadi tantangan bagi daerah perkotaan seperti Kota Bandung.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2025) mengenai jumlah penduduk Indonesia menurut jenis kelamin per Juni 2025, total populasi Indonesia tercatat telah mencapai 284,4 juta jiwa. Angka yang besar ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak cukup hanya berfokus pada kuantitas penduduk, tetapi juga harus diarahkan pada peningkatan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik berpotensi menimbulkan

berbagai permasalahan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya kualitas kesehatan masyarakat.

Berdasarkan data dari laman resmi kampunskb.kemendukbangga.go.id per April 2026 (Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, 2026), seluruh 151 kelurahan di Kota Bandung telah terbentuk sebagai Kampung KB dengan rincian klasifikasi: 5 Dasar, 57 Berkembang, 2 Mandiri, dan 87 Berkelanjutan. Jumlah yang mencapai tingkatan Mandiri dan Berkelanjutan baru berjumlah 89 kelurahan (58,9%) (DPPKB Kota Bandung, 2026). Namun, capaian di atas kertas ini berbanding terbalik dengan realitas lapangan. Pengamatan awal menunjukkan program belum efektif secara kualitas karena indikatornya belum terukur, koordinasi lintas sektor lemah, dan keaktifan kelurahan tidak konsisten akibat minimnya insentif kader pelaksana.

Seluruh kelurahan di Kota Bandung memang telah terbentuk sebagai Kampung KB secara administratif, namun kondisi tersebut belum sepenuhnya menunjukkan keberhasilan implementasi kebijakan secara substantif. Keberhasilan administratif belum tentu mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program di lapangan. Hal ini terindikasi dari data pemantauan internal yang menunjukkan bahwa dari seluruh wilayah yang terbentuk, baru sekitar 91 kelurahan yang dinilai aktif secara konsisten dalam menjalankan program kerja di lapangan. Dengan demikian, keberhasilan Program Kampung KB tidak hanya diukur dari terbentuknya program di setiap wilayah, tetapi juga dari efektivitas implementasi kebijakan dalam mencapai tujuan pembangunan keluarga berkualitas.

Sebagai wilayah perkotaan dengan kompleksitas sosial yang tinggi, Kota Bandung menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan Program Kampung KB, mulai dari koordinasi lintas sektor, keterbatasan sumber daya pelaksana, hingga partisipasi masyarakat yang belum merata. Situasi tersebut menunjukkan adanya hambatan implementasi kebijakan yang berpotensi memengaruhi pencapaian tujuan program.

Penelitian ini menggunakan perspektif implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Nugroho (2003:167–168) untuk memahami berbagai hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Kampung KB. Model implementasi kebijakan ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh beberapa dimensi yang saling berkaitan.

Pertama, dari dimensi standar dan tujuan kebijakan, belum terdapat indikator yang secara spesifik mengukur suatu kampung dapat dikatakan “berkualitas”. Seluruh kelurahan diwajibkan membentuk Kampung Keluarga Berkualitas, namun ukuran keberhasilan program belum dirumuskan secara jelas dan terukur. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam proses monitoring dan evaluasi program.

Kedua, dari dimensi aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program belum berjalan optimal. Meskipun pelaksanaan program telah melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) serta membentuk tim koordinasi, arah keterlibatan dan teknis pelaksanaan kolaborasi antar-OPD masih belum sepenuhnya terintegrasi sehingga pelaksanaan program cenderung berjalan secara parsial.

Ketiga, dari dimensi sumber daya, keterbatasan sumber daya turut memengaruhi keberlanjutan program. Pengurus dan kader yang terlibat dalam pengelolaan Program Kampung KB tidak memperoleh honorarium, sementara komposisi usia pelaksana yang beragam memengaruhi kapasitas dan intensitas pelaksanaan kegiatan. Selain itu, partisipasi masyarakat masih belum merata yang menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat sebagai subjek utama program belum berjalan optimal.

Penelitian mengenai implementasi Program Kampung KB telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi Program Kampung KB di wilayah perkotaan, khususnya Kota Bandung dengan kompleksitas sosial yang tinggi, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan Program Kampung KB di Kota Bandung beserta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Implementasi Kebijakan Kampung Keluarga Berkualitas di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung.”***

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan kajian pada implementasi kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung. Fokus penelitian diarahkan untuk mengetahui pelaksanaan program di lapangan, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat

implementasi kebijakan, serta mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut agar program dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Kampung Keluarga Berkualitas di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung?
2. Bagaimana upaya mengatasi faktor penghambat implementasi kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat implementasi kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian implementasi kebijakan publik, khususnya dalam bidang administrasi publik. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan akademik serta menjadi referensi atau rujukan bagi penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas.